

DAMPAK PENGEMBANGAN WISATA SEJARAH TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN OBJEK WISATA KAPAL APUNG PUNGE BLANG CUT KOTA BANDA ACEH

Rifki Maulana¹, T.Syarifuddin², Riantofani^{3*)}

¹²³Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

rifikimaulana010603@gmail.com, poondin2020@gmail.com, riantaufani@gmail.com

ABSTRACT

Tourism plays an important role in increasing community income, both directly through increasing sales turnover and additional income for tourism business actors, and indirectly through increasing land values, accommodation, and transportation. Overall, tourism development has a positive impact on the income of various community livelihood sectors. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type where data acquisition uses observation, interview and documentation techniques. The results of the study explain that the existence of the UPTD Kapal Apung tourist attraction has had an impact on the community of Gampong Punge Blang Cut by empowering the community in developing businesses, both as street vendors and businesses selling souvenirs. The empowerment that is prioritized for the community of Gampong Punge Blang Cut has yielded results, especially from the economic improvements felt by the community and jobs that are easy to obtain. The development of historical tourism investment in UPTD Kapal Apung has made a positive contribution to the economy of the community of Gampong Punge Blang Cut. Where the socio-economy of the surrounding community creates business opportunities for the community, contributes to the local economy or income obtained by the community as business actors, contributes to the Village which receives Regional Original Income every year.

Keywords : Floating Boat Tourism, Community Empowerment, Economic Development

ABSTRAK

Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, baik secara langsung melalui peningkatan omset penjualan dan penghasilan tambahan bagi pelaku usaha wisata, maupun secara tidak langsung melalui kenaikan nilai tanah, penginapan, dan transportasi. Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata memberikan dampak positif terhadap pendapatan berbagai sektor mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana perolehan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan objek wisata UPTD Kapal Apung telah membawa dampak bagi masyarakat Gampong Punge Blang Cut dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha, baik sebagai pedagang kaki lima maupun usaha yang menjual souvenir. Pemberdayaan yang diprioritaskan untuk masyarakat Gampong Punge Blang Cut telah membuahkan hasil, terutama dari peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat serta lapangan pekerjaan yang mudah untuk didapatakan. Adanya pengembangan investasi pariwisata sejarah UPTD Kapal Apung telah memberikan kontribusi positif bagi ekonomi masyarakat Gampong Punge Blang Cut. Dimana sosial perekonomian masyarakat sekitar terciptanya peluang usaha bagi masyarakat, berkontribusi terhadap perekonomian lokal atau penghasilan yang diperoleh masyarakat sebagai pelaku usaha, berkontribusi terhadap Gampong yang menerima Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Kata Kunci : Pariwisata Kapal Apung, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung lainnya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pariwisata telah menjadi instrumen strategis dalam upaya pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian budaya lokal.

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, serta jejak sejarah yang kuat, yang semuanya menjadi modal penting dalam pengembangan industri pariwisata. Keberagaman budaya dan sejarah yang dimiliki oleh setiap daerah membuka peluang besar untuk pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya lokal yang otentik.

Kota Banda Aceh adalah salah satu wilayah yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi, khususnya setelah tragedi tsunami tahun 2004 yang meninggalkan jejak mendalam dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Salah satu peninggalan penting dari peristiwa tersebut adalah Kapal Apung di Gampong Punge Blang Cut, yang kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah.

Objek wisata sejarah Kapal Apung memiliki nilai simbolis yang tinggi sebagai saksi bisu bencana alam besar, sekaligus menjadi tempat edukatif dan reflektif bagi para pengunjung. Perubahan fungsi kawasan ini menjadi objek wisata membuka potensi baru bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif dan usaha jasa pariwisata.

Dampak dari pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut terlihat dalam dua bentuk: dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung mencakup peningkatan pendapatan

masyarakat melalui sektor perdagangan, transportasi, jasa pemandu wisata, serta usaha makanan dan minuman. Sementara itu, dampak tidak langsung mencakup peningkatan nilai jual properti, meningkatnya akses infrastruktur, dan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Namun demikian, potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan oleh pemerintah maupun pengelola wisata. Pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata belum terimplementasi secara maksimal, yang ditandai dengan masih minimnya melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pengelolaan objek wisata.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan rasa memiliki, memperkuat kapasitas lokal, serta mendukung pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Tanpa pemberdayaan yang tepat, manfaat pariwisata berisiko hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak merata di tingkat lokal.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan investasi pariwisata masih belum menunjukkan performa yang optimal. Sejumlah kebijakan seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, debirokratisasi, dan promosi investasi masih terhambat oleh keterbatasan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan infrastruktur kelembagaan yang belum memadai.

Qanun Nomor 3 Tahun 2022 yang disahkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebenarnya telah mengatur kerangka pengembangan kepariwisataan di wilayah tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi qanun ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku

usaha, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Salah satu aspek penting yang sering diabaikan adalah pembangunan kapasitas masyarakat lokal. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata memerlukan pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap sumber daya dan informasi guna mendukung keterlibatan mereka dalam ekosistem pariwisata.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat di sekitar objek wisata Kapal Apung belum mendapatkan penguatan secara sistematis dalam hal kesadaran, keterampilan, dan partisipasi dalam pengembangan pariwisata. Hal ini berdampak pada rendahnya kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Di sisi lain, investor yang tertarik menanamkan modal di sektor pariwisata sering kali menghadapi kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Kurangnya transparansi dan efisiensi dalam perizinan serta belum tersedianya insentif pajak secara progresif menjadi penghambat utama dalam menarik minat investor domestik maupun asing.

Dalam konteks promosi, pemerintah Kota Banda Aceh belum memanfaatkan secara maksimal media digital dan platform informasi sebagai alat untuk menarik minat wisatawan maupun investor. Padahal, di era digital, keterbukaan informasi dan promosi yang inovatif merupakan elemen penting dalam penguatan daya saing destinasi wisata.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta akademisi dalam merancang strategi pengembangan wisata sejarah yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman mengenai dampak sosial ekonomi dari pengembangan wisata

sejarah serta tantangan implementasi kebijakan yang menyertainya.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata sejarah di UPTD Kapal Apung Punge Blang Cut, serta mengevaluasi dampak pengembangan investasi pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dalam kerangka kebijakan publik yang berlaku.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lain yang berada dalam garis komando pemerintah. Tujuan utama kebijakan ini adalah menyelesaikan berbagai permasalahan publik dan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Harold D. Laswell, kebijakan publik adalah program pencapaian tujuan dan nilai-nilai tertentu. Amara Raksasataya menambahkan bahwa kebijakan mencakup tiga elemen penting, yaitu tujuan, strategi pencapaian, dan input pendukung. Kismartini menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat, dirancang dalam bentuk program/proyek, dapat berasal dari berbagai pihak, serta membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya. Istilah "publik" memiliki makna luas, mulai dari umum, rakyat, hingga masyarakat, seperti dalam istilah *public opinion*, *public library*, dan *public health*.

Anderson menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh aktor-aktor untuk menangani masalah publik. Wibawa melihatnya sebagai rencana kegiatan yang

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Parker menekankan bahwa kebijakan publik adalah respons pemerintah terhadap situasi tertentu, dan Sadhana menekankan bahwa kebijakan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan rencana yang telah dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk mengubah keputusan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Menurut para ahli seperti Meter dan Horn, Mazmanian dan Sabatier, serta Goggin, implementasi merupakan fase penting yang mencakup kegiatan operasional, sistem kerja, struktur organisasi, dan prosedur yang efektif.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial-politik-ekonomi, kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia dan finansial, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Ketidakberhasilan implementasi sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kesalahan administrasi, ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas sosial, serta konflik tujuan antar kebijakan.

Oleh karena itu, Implementasi kebijakan juga harus mempertimbangkan desain program, pelaksanaan yang efektif, serta sistem pengawasan dan evaluasi. Selain itu, komunikasi yang jelas, komitmen para pelaksana, dan kohesivitas tim implementasi menjadi faktor penting dalam menghindari distorsi kebijakan.

2. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata menurut Schulalard dalam Suwena (2017) mencakup aktivitas kedatangan, keberadaan, dan perpindahan wisatawan di suatu wilayah. Giantari dan Barreto (2015) mendefinisikan pengembangan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik objek wisata agar

lebih menarik bagi pengunjung. Menurut Swarbrooke dalam Silitonga dan Anom (2016), pengembangan pariwisata merupakan upaya terpadu memanfaatkan sumber daya secara terintegrasi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Tujuan utama pengembangan pariwisata adalah mendorong pembangunan ekonomi lokal, regional, dan nasional. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Sastrayuda (2022) menyebut lima pendekatan dalam perencanaan pengembangan: partisipatif, potensi dan karakteristik, pemberdayaan masyarakat, kewilayahan, serta optimalisasi potensi.

Industri pariwisata seperti biro perjalanan, hotel, dan restoran memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata. Selain itu, keberlanjutan pengembangan wisata perlu dijaga untuk mencegah dampak negatif terhadap budaya dan sosial masyarakat.

Menurut Cooper dkk. dalam Sunaryo (2013), terdapat empat komponen utama yang harus dimiliki destinasi wisata: Daya tarik alam, Budaya, dan seni, Kemudahan akses dan transportasi, Fasilitas akomodasi dan layanan, Organisasi pendukung pelayanan wisata..

3. Pemberdayaan masyarakat dalam lingkungan pariwisata

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Indonesia cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek pasif dari berbagai program yang dirancang dan dijalankan oleh negara. Dalam paradigma pembangunan lama, peran masyarakat sangat terbatas, dan arah pembangunan lebih dikendalikan oleh kepentingan negara dan akumulasi modal. Proses pembangunan bersifat *top-down*, otoriter, dan sentralistik, sehingga aspirasi masyarakat lokal kurang mendapat ruang yang memadai. Dalam paradigma ini,

pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, infrastruktur fisik, dan stabilitas politik, tanpa banyak melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Namun, paradigma pembangunan tersebut telah mengalami pergeseran menuju paradigma baru yang menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Paradigma pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan untuk memulai, mengelola, dan menikmati hasil pembangunan. Negara dalam hal ini bukan lagi aktor utama yang mendikte arah pembangunan, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan ruang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat, prakarsa lokal, dan institusi-institusi yang mandiri. Pembangunan dalam paradigma ini lebih demokratis, desentralistik, dan partisipatoris.

Menurut Adi (2013), pemberdayaan masyarakat tidak memiliki satu pengertian yang tunggal. Makna pemberdayaan dapat berbeda tergantung pada cara pandang individu atau institusi, serta dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya. Secara umum, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, menjadikan mereka mandiri, meningkatkan posisi tawar terhadap kekuatan eksternal yang menekan, serta memperluas kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang mereka miliki. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses fasilitasi masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif terhadap kepentingan bersama, mengidentifikasi kebutuhan, mengorganisasi sumber daya, dan menjalankan aksi sosial untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih jauh lagi, pemberdayaan juga mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan cara

memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta sumber daya ekonomi seperti tanah dan modal. Dalam konteks ini, pemberdayaan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok marginal.

Purbantara dan Mujiyanto dalam Eko (2014) menggarisbawahi bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, pemberdayaan adalah proses pembangunan yang berkelanjutan dan terorganisir, dimulai dari tahap perencanaan awal hingga pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi. Kedua, pemberdayaan bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Ketiga, pemberdayaan melibatkan upaya untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, sesuai dengan prinsip "*to help the community to help themselves*". Keempat, pemberdayaan bertujuan untuk memandirikan masyarakat melalui partisipasi aktif dan aksi kolektif dalam menyelesaikan persoalan serta memenuhi kebutuhan lokal.

4. Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula dengan posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat, dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa status (Dewi, 2019: 62). Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan (Wayan, 2014: 32).

Soekanto (2017: 208) menyatakan bahwa ukuran atau kriteria yang biasa

dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran kekayaan, barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan, pekerjaan orang tua, penghasilan dan seterusnya.
- b. Ukuran kekuasaan barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atas.
- c. Ukuran kehormatan ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan/atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Misalnya aktivitas sosial di lingkungan masyarakat.
- d. Ukuran ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan.

Tan dalam Anisah dan Riswandi (2015: 71) bahwa kedudukan sosial ekonomi mencakup 3 (tiga) faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Kehidupan sosial ekonomi dititik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan air yang sehat serta didukung oleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya, sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupinya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat sari masalah lainnya.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:11), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, Kirk dan Miller dalam Komara dan Syoedib (2022:17) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan terhadap manusia, baik dalam lingkungannya maupun dalam penggunaan istilah yang mereka gunakan.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang diteliti dianggap kompleks dan dinamis. Untuk memperoleh data yang mendalam dan alami, peneliti menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami situasi sosial secara lebih menyeluruh dan menemukan pola serta teori yang sesuai dengan realitas di lapangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak pemberdayaan dan peran masyarakat Pada Pariwisata sejarah UPTD Kapal Apung di Punge Blang Cut Kota Banda Aceh.
2. Dampak pengembangan investasi pariwisata sejarah UPTD Kapal Apung

terhadap sosial ekonomi masyarakat di Punge Blang Cut Kota Banda Aceh.

Lokasi penelitian berada di UPTD Kapal Apung Punge Blang Cut Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Masyarakat yang tinggal di lingkungan pariwisata UPTD Kapal Apung belum diberdayakan oleh pengelola terhadap keterampilan usaha.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi, dilakukan untuk memahami secara langsung. Nasution dalam Sugiyono (2019: 226), observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan karena para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data berupa fakta dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Sementara itu, Satori dan Komariah (2011:105) menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dengan demikian, observasi menjadi metode penting dalam pengumpulan data yang valid dan relevan untuk penelitian.
2. Wawancara Mendalam, dilakukan terhadap lima informan kunci yang terdiri dari: Keuchik, Wisatawan, Pedagang, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat. Satori dan Komariah (2011: 130) mengatakan bahwa “wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung, melalui percakapan atau tanya jawab”..
3. Studi Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara maka proses dokumentasi perlu untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang lebih pasti, karena sifat dokumen tidak mudah diubah-ubah bukan berbentuk lisan. Dokumentasi

dapat berbentuk catatan, surat-surat, cendera mata, laporan, artefak, foto dan sebagainya.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi:

1. Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dirangkum dan disimpan tanpa mengurangi makna data.
2. Penyajian Data, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami alur dan pola data yang ditemukan di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan, Setelah data disajikan, peneliti melakukan interpretasi dan kesimpulan berdasarkan pola, tema, atau kecenderungan yang muncul dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan data baru yang lebih relevan.

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai dampak pengembangan sejarah wisata terhadap sosial ekonomi masyarakat di kawasan objek wisata yang diteliti .

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Sejarah

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan objek wisata menunjukkan adanya pergeseran positif dalam peran serta masyarakat. Masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam kegiatan ekonomi yang tumbuh di sekitar kawasan wisata. Mereka memanfaatkan peluang yang ada untuk menjalankan usaha seperti

berdagang makanan, minuman, dan suvenir, yang merupakan bentuk usaha produktif berkelanjutan. Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik dari segi keterampilan usaha maupun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan wisata agar tetap aman dan bersih melalui gotong-royong.

Partisipasi aktif ini menandakan tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kawasan wisata. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti terbatasnya ruang usaha dan kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah lapak dagang. Namun, kendala ini tidak mengurangi antusiasme dan semangat masyarakat untuk tetap terlibat. Lebih lanjut, objek wisata UPTD Kapal Apung memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Peningkatan jumlah pengunjung, terutama saat akhir pekan dan hari libur, berdampak langsung pada peningkatan omset para pedagang. Pendapatan yang dulunya rendah kini mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya menjadi penunjang ekonomi tambahan, tetapi telah bertransformasi menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat serta menjadi penggerak roda perekonomian lokal secara menyeluruh.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dampak utama dari pengembangan wisata sejarah di kawasan Kapal Apung Punge Blang Cut. Proses pemberdayaan ini melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuka usaha, seperti berdagang makanan, minuman, serta menjual cendera mata kepada para wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata tersebut.

Selain itu, pengelolaan objek wisata juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan wisata. Masyarakat lokal dilibatkan dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berfungsi sebagai motor penggerak pengelolaan wisata berbasis komunitas. Keterlibatan ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian objek wisata sejarah yang ada di wilayah mereka.

Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah dan pengelola wisata memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai pelayanan wisata, pengelolaan usaha kecil, serta edukasi tentang pentingnya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu bersaing dan berinovasi dalam mengembangkan usaha yang mendukung sektor pariwisata.

Dampak positif dari pemberdayaan masyarakat terlihat dari meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan objek wisata. Masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menciptakan suasana yang ramah bagi wisatawan, sehingga meningkatkan daya tarik wisata sejarah Kapal Apung Punge Blang Cut di mata pengunjung. Keterlibatan masyarakat juga memperkuat hubungan sosial antarwarga karena adanya tujuan bersama dalam memajukan desa wisata.

Namun, dalam proses pemberdayaan ini juga terdapat tantangan, seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya pengalaman dalam mengelola bisnis, serta masih rendahnya pemahaman tentang pemasaran digital. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan untuk

memastikan berlanjutnya program pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata .

Secara keseluruhan, pemberdayaan dan peran aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam pengembangan wisata sejarah yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, pengelolaan wisata menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta budaya yang nyata bagi masyarakat lokal.

2. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan sejarah wisata Kapal Apung Punge Blang Cut berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kini dapat memperoleh penghasilan dari berbagai aktivitas ekonomi yang muncul akibat berkembangnya sektor pariwisata. Usaha kecil seperti warung makan, toko oleh-oleh, jasa pemandu wisata, hingga penyewaan transportasi lokal menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat . Peningkatan pendapatan masyarakat tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha secara langsung, tetapi juga oleh warga yang bergerak di sektor pendukungnya, seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Permintaan terhadap produk lokal meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke kawasan wisata sejarah tersebut. Hal ini menciptakan efek yang positif terhadap perekonomian lokal .

Selain pendapatan langsung, pengembangan wisata juga memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan nilai aset masyarakat, seperti tanah, rumah, dan bangunan yang berada di sekitar kawasan wisata. Banyak warga yang memanfaatkan peluang ini dengan menyewakan rumah atau kamar kepada wisatawan, sehingga memperoleh

tambahan penghasilan yang signifikan. Peningkatan nilai properti juga menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat setempat .

Kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat seiring dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengembangan wisata sejarah mendorong terciptanya berbagai jenis pekerjaan baru, mulai dari sektor jasa hingga industri kreatif. Hal ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat di kawasan Punge Blang Cut .

Namun demikian, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menghadapi tantangan, seperti persaingan usaha yang semakin ketat, meningkatnya jumlah wisatawan musiman, serta kebutuhan akan peningkatan kualitas produk dan layanan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan .

Secara umum, pengembangan wisata sejarah Kapal Apung Punge Blang Cut telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dampak positif ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri .

3. Kebijakan Pengembangan Investasi Pariwisata dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi

Kebijakan pengembangan investasi pariwisata di kawasan Kapal Apung Punge Blang Cut menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2022 sebagai landasan hukum untuk mendukung pengembangan

wisata sejarah dan pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut .

Salah satu kebijakan yang diambil adalah pemberian insentif investasi, seperti tax Allowance, keringanan bea masuk, hingga super deduction tax bagi investor yang menanamkan modal di sektor pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik minat investor, baik lokal maupun nasional, agar berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata di kawasan Kapal Apung Punge Blang Cut. Selain itu, pemerintah juga melakukan debirokratisasi proses perizinan investasi untuk memudahkan investor dalam mengembangkan usaha pariwisata .

Dampak dari kebijakan ini terlihat dari meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke sektor pariwisata di kawasan tersebut. Investasi yang masuk digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata, seperti jalan, tempat parkir, fasilitas umum, serta promosi wisata sejarah ke berbagai daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal .

Selain aspek ekonomi, kebijakan pengembangan investasi pariwisata juga berdampak pada aspek sosial masyarakat. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas jaringan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan investasi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam mengelola usaha pariwisata secara profesional .

Namun, kebijakan pengembangan investasi juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Peningkatan investasi harus diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian situs sejarah, serta melibatkan

masyarakat dalam setiap tahap pengembangan wisata .

Dengan demikian, kebijakan pengembangan investasi pariwisata yang tepat dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif yang luas terhadap sosial ekonomi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di kawasan Kapal Apung Punge Blang Cut Kota Banda Aceh.

4. Peningkatan promosi investasi pariwisata

Peningkatan promosi investasi pariwisata merupakan dimensi penting dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan kompetitif. Promosi investasi pariwisata di Gampong Punge Blang Cut, khususnya pada objek wisata UPTD Kapal Apung, menunjukkan peran penting dalam menarik perhatian investor sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal. Upaya promosi ini dilakukan tidak hanya melalui jalur formal seperti media dan lembaga pemerintah, tetapi juga secara informal oleh elemen-elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pemandu wisata, dan pelaku usaha lokal. Mereka berperan aktif dalam memperkenalkan potensi wisata dan produk lokal secara langsung kepada para pengunjung.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan promosi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomis dari sektor pariwisata. Masyarakat mulai melihat peluang usaha yang dapat mereka kembangkan, seperti menjual makanan, souvenir, dan jasa lainnya, sembari menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan wisata. Aktivitas ini menjadi bagian dari promosi tidak langsung yang turut menciptakan citra

positif destinasi wisata, yang pada akhirnya memperkuat minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Walaupun strategi promosi yang dilakukan masih bersifat sederhana dan berbasis komunitas, dampaknya sudah mulai terlihat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan masyarakat menunjukkan bahwa objek wisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan dalam usaha produktif seperti berdagang dan menjaga kawasan wisata. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan ruang usaha, partisipasi masyarakat tetap tinggi. Kehadiran objek wisata UPTD Kapal Apung secara signifikan meningkatkan pendapatan warga, terutama pada akhir pekan dan hari libur, menjadikannya sumber utama penghidupan dan penggerak ekonomi lokal.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata memberikan dampak positif karena kawasan wisata ini menciptakan peluang usaha yang luas, seperti berdagang souvenir dan makanan, serta didukung oleh insentif non-material berupa promosi dan fasilitasi dari pemerintah gampong, pemandu wisata, dan mahasiswa. Dukungan ini membentuk ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan, menjadikan UPTD Kapal Apung tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat lokal.
3. Kebijakan pengembangan investasi pariwisata di UPTD Kapal Apung Gampong Punge Blang Cut, berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberian insentif, kemudahan berinvestasi, dan promosi yang efektif, Masyarakat terdorong untuk berwirausaha, tercipta lapangan kerja, dan menarik minat investor.
4. Promosi yang konsisten juga meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperluas pasar produk lokal. Ketiga aspek ini membentuk ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata potensial di Kota Banda Aceh. Promosi investasi pariwisata di Gampong Punge Blang Cut, khususnya untuk objek wisata UPTD Kapal Apung, telah meningkatkan daya tarik investasi dan keterlibatan masyarakat. Promosi dilakukan tidak hanya secara formal, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat, mahasiswa, dan pemandu wisata dalam mengenalkan produk lokal. Kesadaran warga terhadap potensi ekonomi dari pariwisata mendorong mereka untuk berwirausaha dan menjaga lingkungan wisata. Meski promosi masih sederhana dan berbasis komunitas, keterlibatan berbagai pihak telah membuka peluang investasi lebih luas. Dengan promosi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, kawasan ini berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikrisna, Yhoga B., et al. (2016). Analisis Pengaruh Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2014. *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 59-70. doi:10.22219/jep.v14i1.3847.
- Ansofino. (2017). Potensi Daya Tarik Obyek Pariwisata Dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 1(1), 1-15.
- Anwas. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. (2015). *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia. Jakarta: Gramedia.

- Dewi, S. P., & Hidayat, R. (2014). Pengaruh Net Profit Margin dan Return on Assets terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(1), 1-10.
<https://doi.org/10.35126/ilman.v1i1.474>.
- Eko, W.A. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53-65.
- Firmansyah, W. (2023). Analisa Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi di Kampung Wisata Pantai Pasir Putih, *Perkembangan Ekonomi Syariah di era Globalisasi*, 1(1), 1-10.
- Hadiwijoyo, S.S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hakim, L. (2018). *Dasar-Dasar Ekowisata*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Hayat, & Zaini, R. A. (2018). *Perencanaan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan*, Malang: Inteligencia Media.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata*, Yogyakarta: Gebang Media Aksara.
- Kismartini., Suwitri, S., & Purnaweni, H. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Komara, E., Syaodih, E., & Andriani, R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.